

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Covid-19 tercatat sebagai momen penting dalam sejarah dan telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Beberapa sektor yang terkena dampaknya harus cepat beradaptasi dan mengambil tindakan dengan membentuk kebijakan dan strategi di masa depan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar untuk berinovasi dan melakukan perbaikan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Salah satu dampak dari munculnya covid-19 yang dirasakan oleh satuan pendidikan adalah adanya krisis pembelajaran (*learning lost*) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Sebagai salah satu upaya pemulihan pembelajaran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka (Kemendikbud, 2022).

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan berbagai macam pembelajaran intrakurikuler di mana tujuannya adalah agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dengan adanya konten yang lebih optimal (Kemendikbud, 2023). Kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik dengan tujuan untuk mengasah minat dan bakat mereka sejak dini. (Nurwiatin, 2022).

Kurikulum menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan tujuan pendidikan karena perannya sebagai pemberi arah, isi, maupun proses pendidikan. Dalam hal ini, agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan pendidikan, maka kurikulum harus bersifat dinamis. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan kurikulum dari waktu ke waktu (Rezeki et al., 2022).

Adapun pengembangan atau penyempurnaan kurikulum dalam perspektif Al-Qur'an terdapat pada Surat Al Hasyr ayat 18, sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Sehubungan dengan ayat di atas, dipahami oleh Thabataba'i dalam (Shihab, 2011) perintah untuk memerhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Diumpamakan seperti seorang tukang yang telah selesai dengan pekerjaannya. Ia diharuskan untuk memerhatikannya kembali bila masih ada kekurangan, sehingga saatnya tiba untuk diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil dengan sempurna. Setiap mukmin dituntut melakukan hal itu. Jika baik ia mendapat ganjaran, dan jika buruk amalnya hendaknya ia segera bertaubat. Dengan dasar ini pula, ulama Quraisy Shihab berpendapat bahwa perintah takwa yang kedua dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan amal-amal yang telah dilakukan dengan dasar perintah takwa yang pertama. Maka dari itu, pengembangan kurikulum yang baik perlu dilakukan guna memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum yang sudah terlaksana sebelumnya untuk memastikan bahwa pendidikan tetap relevan, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat sehingga tercapainya tujuan pendidikan.

Dalam menghadapi tantangan di tengah perubahan dinamis dunia pendidikan, pentingnya lembaga pendidikan melakukan pengembangan berkelanjutan untuk menjaga sekolah tetap dalam kondisi yang layak. Sekolah harus merancang dan melaksanakan strategi pengembangan yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka. Pengembangan lembaga pendidikan yang efektif akan membantu sekolah untuk tetap relevan dan sukses dalam memberikan pendidikan berkualitas.

Kurikulum merdeka sebagai salah satu elemen pengembangan pendidikan menjadi faktor penentu tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Dengan

demikian, dalam hal perencanaan dan pengembangannya, lembaga pendidikan harus semaksimal mungkin mengembangkan *networking horizontal* dengan *stake holder* dan komunitas sekolah yang peduli terhadap pengembangan lembaga pendidikan (Rosyada, 2007). Dalam hal ini, untuk mendorong terciptanya sinergi antara lembaga pendidikan dengan *stakeholder*-nya lembaga pendidikan membutuhkan tata kelola yang baik, dan akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja secara jelas dan transparan (Noor & Rahmatillah, 2020).

Tata kelola dalam dunia pendidikan menjadi salah satu bagian dari manajemen pendidikan yang dapat merubah tatanan kehidupan sekolah. Makin baik sebuah tatanan kehidupan sekolah yang merupakan perwujudan dari tata kelola pendidikan akan berdampak pada peningkatan kinerja sekolah. McAdams dalam buku (Campbell et al., 2024) menyatakan ketika tata kelola bekerja dengan baik, itu tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas program pendidikan, tetapi juga menciptakan komitmen berkelanjutan jangka panjang terhadap kualitas dan peningkatan berkelanjutan.

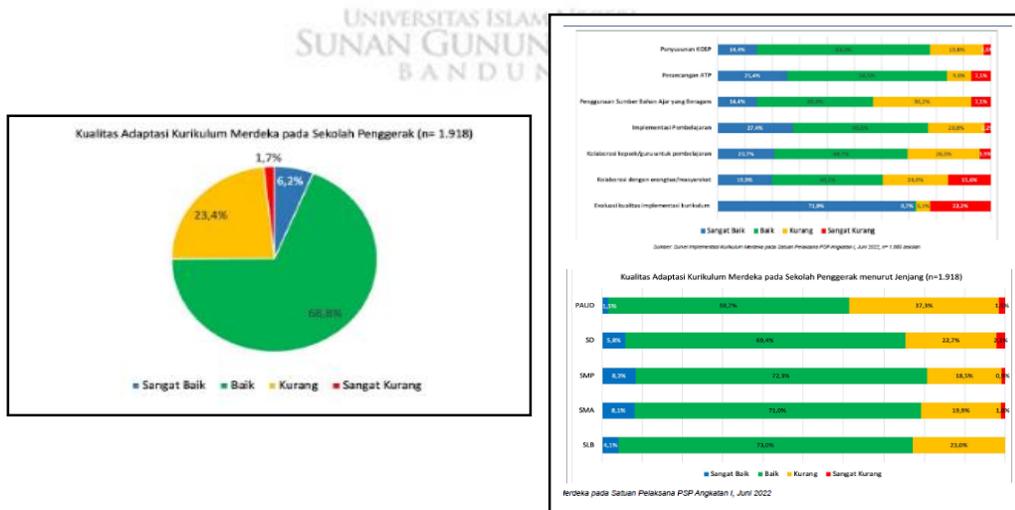
Dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang berkualitas tentunya bukan hal yang mudah, sehingga memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni untuk melaksanakannya. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya kualitas tata kelola sekolah disebabkan oleh kepemimpinan kepala sekolah yang tidak visioner dan guru yang tidak inovatif. Setiap lembaga pendidikan akan memiliki kualitas tata kelola yang baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang andal (Harapan et al., 2022).

Adanya kebijakan pendidikan berupa pengembangan kurikulum yaitu Kurikulum Merdeka menentukan cara lembaga memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan mencapai tujuan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan standar nasional pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa standar nasional pendidikan

merupakan acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Presiden Republik Indonesia, 2021).

Implementasi Kurikulum Merdeka secara terbatas dimulai pada tahun 2021 di Sekolah Penggerak yang berada di 111 kabupaten/kota. Pada tahun 2022 dimulai implementasi Kurikulum Merdeka untuk Jalur Mandiri. Berdasarkan data Kemdikbudristek, BSKAP, dan Puskujar tahun 2023/2024, sekitar 73 persen yaitu lebih dari 300 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah menerapkan Kurikulum Merdeka mulai dari PAUD/TK/KB, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, SMK/Sederajat, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus, dan SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri) (Kemdikbudristek et al., 2024).

Pada sejumlah sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, dinilai mampu mengadaptasi Kurikulum Merdeka secara baik. Penilaian ini berdasarkan survei pada guru dan kepala sekolah dari 1.918 satuan pendidikan dengan 7 indikator: 1) penyusunan kurikulum operasional, 2) perancangan alur tujuan pembelajaran, 3) penggunaan sumber bahan ajar yang beragam, 4) implementasi pembelajaran, 5) kolaborasi kepek/guru untuk pembelajaran, 6) kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, dan 7) evaluasi kualitas implementasi kurikulum (Kemdikburistek, 2022). Adapun statistiknya sebagai berikut.



**Gambar 1. 1 Kualitas Adaptasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak**



Berdasarkan beberapa data di atas, diketahui bahwa pada sejumlah sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka terdapat beberapa perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kepiawaian kepala sekolah dalam tata kelola satuan pendidikan. Hal ini menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan dampak yang signifikan pada satuan pendidikan yang menerapkannya.

Namun pada pelaksanaannya, BSKAP menyebutkan bahwa sekitar 20% satuan pendidikan belum menerapkan Kurikulum Merdeka. Oleh karenanya, BSKAP terus memberikan pendampingan intensif agar persentase tersebut semakin kecil dengan meyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada guru. Salah satunya program guru penggerak. Melalui program ini, Kemdikbudristek sudah melatih puluhan guru sebagai calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah. Ada juga pelatihan untuk kepala sekolah melalui Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Kemdikbudristek juga menyiapkan alat bantu PMM (Platform Merdeka Mengajar). PMM menyediakan materi ajar mulai buku sampai modul dan asesmen kelas. Bagi sekolah yang belum siap melaksanakannya, mereka dapat melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025/2026 dan wajib menerapkan Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2027/2028. Karena tepat pada Rabu, 27 Maret 2023 melalui Peraturan Mendikbudristek No. 12 Tahun 2024, Kurikulum Merdeka ditetapkan secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia (Kemdikbudristek, 2024). Dengan demikian, waktu tiga tahun inilah sekolah tersebut harus bersiap untuk menjalankan kebijakan Kurikulum Merdeka beserta semua pembaharuan dan perubahan di dalamnya. Karena menurut Sasmita dan Darmansyah penerapan kurikulum merdeka sudah tentu akan membawa dampak dan perubahan secara signifikan mengenai guru dan tenaga pendidik di sekolah, baik dari segi administrasi, strategi dan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, bahkan proses evaluasi pembelajaran (Sasmita & Darmansyah, 2022).

Adapun masalah umum yang sering terjadi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di sekolah antara lain berasal dari kondisi fasilitas (sarana prasarana) (Rahayu et al., 2022), kondisi guru dan tenaga pendidik (Fitriyah & Wardani, 2022), kondisi siswa, lingkungan, keluarga (Sumarsih et al., 2022b), serta beberapa hambatan berasal dari kebijakan pemerintah (Hidayati et al., 2022).

Fenomena tersebut didukung oleh hasil penelitian dari (Indriyani & Jannah, 2023) bahwa kurikulum dan persiapan implementasinya di sekolah mempunyai banyak aspek yang harus diperhatikan. Kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas sekolah merupakan aspek terpenting dalam penerapan kurikulum merdeka. Sekolah perlu waktu untuk menyesuaikan diri, bukan hanya terkait pemahaman filosofisnya, tetapi juga pada penyiapan perangkat teknis pembelajaran dan menyangkut tentang pelaksanaan proyek. Contohnya seperti memperhatikan capaian pembelajaran, perangkat pembelajaran, sumber belajar, profesionalitas guru, metode pembelajaran, dan penilaian. Sebelum menerapkan kurikulum merdeka juga harus dilakukan sosialisasi kepada guru, peserta didik, wali murid, dan masyarakat sekitar.

Penelitian ini memiliki urgensi yang cukup penting, terutama mengingat pentingnya posisi kurikulum membuat proses penyusunan dan pengembangan kurikulum harus lebih berhati-hati dan tidak bisa sembarangan dalam penyusunannya, melainkan harus didasarkan pada landasannya, sehingga dalam mengembangkan kurikulum harus diidentifikasi dan dikaji dengan akurat, selektif, mendalam, dan menyeluruh mengenai landasan yang akan dijadikan pijakan dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum (Rosmana et al., 2022). Hal ini tentunya akan menentukan bagaimana lembaga pendidikan memanfaatkan sumber daya yang mendukung untuk berlangsungnya proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kurikulum merdeka memengaruhi tata kelola lembaga pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Maryatini mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel pengembangan kurikulum dan efektivitas sekolah. Dari hasil koefisien jalur yang diperoleh sebesar  $T_{statistik} = 2,949$  dengan nilai  $P\text{-Value } 0.003 < 0,05$  disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengembangan Kurikulum terhadap Efektivitas sekolah. Semakin tinggi Pengembangan Kurikulum maka akan semakin positif efektivitas sekolah (Maryatini, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengambil tema Implementasi kurikulum baru yang belum lama ini diluncurkan oleh kemendikbudristek, yaitu Kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh beberapa sekolah yang pada akhirnya nanti akan kita ketahui pengaruh implementasi Kurikulum Merdeka terhadap tata kelola pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung.

Maka dari itu, untuk menganalisis dan mengidentifikasi lebih jauh tentang sejauh mana implementasi kurikulum merdeka memengaruhi tata kelola pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung, maka peneliti tertarik mengambil judul **“PENGARUH IMPLMENTASI KURIKULUM MERDEKA TERHADAP TATA KELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN (Penelitian di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi kurikulum merdeka dan tata kelola di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung?
2. Bagaimanakah implementasi kurikulum merdeka dalam tata kelola di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung?
3. Sejauh manakah pengaruh implementasi kurikulum merdeka terhadap tata kelola di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung
2. Untuk memahami tata kelola di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung
3. Untuk menganalisa pengaruh implementasi kurikulum merdeka terhadap tata kelola di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan khazanah ilmu Manajemen Pendidikan Islam khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka sehingga mengetahui bagaimana cara sekolah memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para praktisi dalam mendukung pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan atau tolak ukur dalam memutuskan regulasi atau kebijakan bagi stakeholder sekolah yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka untuk menggerakkan lembaga dan pihak terkait ke arah yang lebih baik.

### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Implementasi Kurikulum Merdeka
  - a. Pengertian Implementasi Kurikulum Merdeka

Implentasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak,

dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut (Rahmat, 2017).

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang strategis di dalam sistem pendidikan, sehingga dalam penyusunan dan pengembangannya tidak boleh dilakukan dengan sembarangan oleh siapapun. Perancangan pengembangan kurikulum yang baik akan menentukan tujuan pendidikan yang jelas dan spesifik, sehingga memudahkan guru dan siswa untuk mencapai tujuan tersebut (Hafiluddin & Wahyudin, 2023).

Menurut (Kemendikbudristek, 2023), kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka berfokus pada konsep “merdeka” untuk seluruh elemen pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan. Konsep “merdeka” yang dimaksudkan adalah kemandirian proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi penyelenggara pendidikan termasuk guru dan kepala sekolah. Kebebasan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tujuan kurikulum merdeka meliputi penyusunan, pembuatan, dan pelaksanaan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa (Nisa & Andaryani, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka adalah proses kegiatan untuk mengukur sejauh mana penerapan konsep “merdeka” pada kurikulum merdeka dapat memudahkan penyelenggara pendidikan untuk menyusun dan melaksanakan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa sehingga dapat meningkatkan kompetensi belajarnya.

#### b. Urgensi Implementasi Kurikulum Merdeka

Dalam implementasi kurikulum merdeka, lembaga pendidikan hanya dapat mewujudkan harapannya untuk bisa memenuhi kebutuhan pendidikan yang relevan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk

mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah. Sekolah dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal dan kebutuhan komunitas. Pendekatan yang lebih merdeka ini mendorong sekolah untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pengalaman belajar yang unik dan bermakna bagi siswa.

Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum, diantaranya adalah peran kepala sekolah, guru, aktivitas peserta didik, fasilitas dan sumber belajar serta komite sekolah (Munthe, 2020). Oleh karena itu, implementasi kurikulum merdeka akan berdampak pada bagaimana sekolah memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan kualitas dan tujuan pendidikan.

#### c. Dimensi Implementasi Kurikulum Merdeka

Dimensi implementasi kurikulum merdeka didukung oleh lima komponen kurikulum operasional satuan pendidikan (Kemendikbud, 2022, p. 6), yaitu:

- 1) Analisis Konteks Karakteristik Satuan Pendidikan, dapat meliputi aspek fisik dan non-fisik, seperti ukuran gedung, jumlah guru, jumlah murid, kurikulum, dan sebagainya. Dengan memahami karakteristik satuan pendidikan, dapat ditentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan, setiap komponennya dapat dikembangkan melalui proses reversible (bolak-balik) antara analisis lingkungan belajar satuan pendidikan, visi-misi satuan pendidikan, serta tujuan dan strateginya. Dalam perencanaan, penting bagi satuan pendidikan untuk mengumpulkan berbagai data untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Informasi ini kemudian dianalisis untuk memberikan kesimpulan yang tepat bagi perencanaan yang optimal. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai cara yang dinilai sesuai dengan kebutuhan berproses selama hasilnya selaras antarkomponennya.

- 2) Prumusan Visi, Misi, dan Tujuan, menjadi referensi arah pengembangan dan menunjukkan prioritas satuan pendidikan.  
Merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan merupakan langkah awal yang sangat penting sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran yang berkualitas dan harus berpusat pada peserta didik.
- 3) Penentuan Pengorganisasian Pembelajaran, cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu.  
Pengorganisasian struktur kurikulum mengatur tentang muatan, kompetensi, dan beban belajar. Untuk dapat mengorganisasi program pembelajaran secara efektif, satuan pendidikan perlu membuat perencanaan berbasis data.  
Penyusunan struktur kurikulum merupakan hal penting di dalam mengorganisasikan pembelajaran. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik pada satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran dan merupakan aplikasi dari konsep pengorganisasian konten dan beban belajar.
- 4) Penyusunan Rencana Pembelajaran, alur pembelajaran yang runtut dinyatakan dalam rangkaian tujuan pembelajaran yang meliputi konten/materi, keterampilan, dan konsep inti untuk mencapai capaian pembelajaran setiap fase dan menjelaskan cakupan/kedalaman setiap konten.
- 5) Perancangan Evaluasi, Pengembangan Profesional, dan Pendampingan.  
Dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan, sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan.

## 2. Tata Kelola Lembaga Pendidikan

### a. Pengertian Tata Kelola Lembaga Pendidikan

Tata kelola adalah proses di mana arah organisasi ditetapkan, strukturnya ditetapkan, dan akuntabilitas baik fiskal maupun program dipastikan. Tata kelola sebagai fungsi dasar organisasi, bagian integral dari sistem, yang menetapkan arah distrik, memastikan tercapainya tujuan strategis dan keharusan moral, meminta

pertanggungjawaban distrik, dan memberikan kepemimpinan kepada masyarakat (Campbell et al., 2024).

Tata kelola merupakan pemanfaatan sumber daya baik manusia atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif. Dengan demikian, tata kelola pendidikan pada dasarnya untuk meraih tujuan pendidikan yang dikehendaki. Yaitu meraih kualitas pendidikan sebagai hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga pendidikan (Saepudin et al., 2020). Oleh karena itu, tata kelola lembaga pendidikan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai proses pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan.

#### b. Urgensi Tata Kelola Lembaga Pendidikan

Tata kelola lembaga pendidikan merupakan elemen strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun sekolah untuk merubah kondisi sekolah menjadi lebih baik. Kepala sekolah yang mampu memobilisasi sumber daya sekolah dengan perannya sebagai leader, memiliki beberapa kemampuan baik dari segi kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi dengan baik akan memberikan dampak yang positif bagi sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

#### c. Indikator Tata Kelola Lembaga Pendidikan

Tata kelola lembaga pendidikan dalam buku (Kemendikbud, 2019, p. 76) menganut prinsip GSG (*Good School Governance*) yang dikemukakan oleh OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) 2013, yaitu:

##### 1) Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai organisasi (Kusmayadi et al., 2015). Transparansi merupakan

keterbukaan dalam pemberian informasi yang relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang mudah diakses serta mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan (Sitepu, 2016). Transparansi adalah kondisi di mana keputusan yang dibuat oleh pejabat di lembaga negara dan sipil dan organisasi swasta di setiap arena dan sub arena terbuka untuk umum untuk diamati, diteliti dan dievaluasi dan di mana informasi public tersedia dan dapat diakses (IGI, 2013).

Transparansi menekankan bahwa pengambilan keputusan, keputusan akhir yang dicapai dan ketaatan terhadap keputusan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan (Ekundayo, 2017). Transparansi dibangun di atas arus informasi yang bebas, dapat diakses secara langsung untuk dipahami dan dipantau (Jindal, 2014).

## 2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab pihak penyelenggara pendidikan, publik (masyarakat) dan lembaga stakeholder (swasta atau pengguna lulusan). Tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas atau kinerja selama dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan, pihak penyelenggara pendidikan wajib memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat dan atau pengguna lulusan. Akuntabilitas sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah antara penyelenggara pendidikan dengan masyarakat atau pengguna lulusan. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel maka sesungguhnya menciptakan hubungan yang harmonis antara berbagai *stakeholders*.

Akuntabilitas mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan dapat dipercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Sekolah yang *accountable* adalah sekolah yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil pihak sekolah

dan memungkinkan pihak eksternal untuk mereview informasi tersebut, dan apabila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif dari pihak eksternal. Sekolah merupakan pihak yang diberi amanah dalam pengelolaan pendidikan. Sekolah harus memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan dan aturan-aturan yang telah dibuat kepada pihak yang terkait dengan pendidikan (*stakeholders*). Pertanggungjawaban kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah tentunya harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Perencanaan yang sudah ditetapkan dijadikan sebagai dasar untuk membangun prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas sekolah diwujudkan dalam laporan keuangan, laporan program kerja dan kinerja, laporan penerimaan pendidik, staf, dan siswa, laporan hasil penyusunan dan perubahan terkait kurikulum, silabus dan jadwal kerja/belajar, laporan penggunaan fasilitas sekolah, laporan hasil kerjasama dengan pihak lain, laporan sistem penggajian dan beasiswa, laporan terkait penghargaan yang diberikan sekolah kepada warga sekolah yang berprestasi, laporan pelaksanaan prosedur kerja, laporan hasil pembelajaran, catatan keluhan guru, staf, dan siswa, laporan dalam penyelenggaraan event, dan ketenagakerjaan, laporan hasil peringkat akreditasi, program pengembangan SDM serta ketersediaan layanan pengembangan.

### 3) Pertanggungjawaban

Prinsip ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban sekolah kepada *stakeholder* dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *good school governance* yaitu mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan sekolah seperti masyarakat, pemerintah, orang tua siswa, dunia usaha dan industri. Prinsip ini menuntut sekolah maupun pimpinan dan stafnya untuk melakukan kegiatan secara bertanggung jawab.

Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang. Selaku manajer, pemimpin, administrator, dan supervisor kepala sekolah mempunyai

tanggung jawab penting dalam mengembangkan semua potensi dan sumber pendidikan yang terdapat di sekolah. Kepala sekolah harus mampu dan berupaya untuk mempergunakan sumber daya dan seefisien dan seefektif mungkin guna pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah yang mempunyai arti penting dalam proses pendidikan harus mampu mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekolah sehingga tercapai keefektifan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di sekolah yang dapat melahirkan perubahan kepada peserta didik. Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah. Kekuasaan lebih besar yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam pembuatan keputusan perlu dilaksanakan secara demokratis, antara lain dengan melibatkan semua pihak khususnya guru dan orang tua peserta didik, membuat keputusan dalam hal-hal yang relevan dengan tugasnya serta menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam tugas peningkatan mutu pendidikan.

#### 4) Kemandirian

Fokus kemandirian sekolah adalah pada peningkatan kualitas sekolah dalam mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Capaian mutu mengacu pada masukan proses, keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, dan sarana sekolah. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja.

Urgensi kemandirian sekolah tak akan lepas dari komponen-komponen penyusunan sekolah, seperti: kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, sarana prasaran, keuangan, layanan khusus, dan stakeholders sekolah. Kemandirian sekolah akan memberikan muara pada kualitas lulusan yang baik, sehingga kualitas output sangat bergantung pada kualitas input dan proses.

Sekolah yang mandiri dan bekinerja unggul akan memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengambil keputusan secara independen, sehingga terbebas dari benturan kepentingan di luar kepentingan sekolah. Pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh komponen sekolah terbebas dari segala pengaruh dan tekanan yang tidak sejalan dengan kepentingan sekolah baik bersifat intern maupun ekstern. Dalam menentukan program sekolah terkait pengembangan kurikulum, silabus dan pengaturan jadwal kerja/belajar, penggunaan faslitas, pengaturan keuangan, model kerjasama, sistem penggajian untuk kesejahteraan guru dan karyawan sekolah, pemberian penghargaan/beasiswa, prosedur kerja dan pengembangan SDM dilakukan secara mandiri dan terbebas dari pengaruh kepentingan pihak yang tidak sejalan dengan program dan tujuan sekolah.

#### 5) Keadilan

Keadilan dalam pelaksanaan manajemen berbasis *good school governance* adalah bahwa setiap pihak dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Keadilan bagi warga masyarakat adalah keterjangkauan dalam kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan pada semua lembaga pendidikan yang ada. Keterbatasan anggaran menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada warganya dalam penyelenggaraan pendidikan. Keadilan tidak hanya mengharuskan pemerintah menjamin warganya untuk memperoleh akses yang sama pada pelayanan pendidikan, tetapi juga pada kualitas pelayanan pendidikan.

Kesetaraan berlaku dalam proses interaksi keseharian di antara warga sekolah dan perlakuan kepala sekolah terhadap warga sekolah. Hal ini juga berlaku dalam memperlakukan guru honorer. Guru honorer diperlakukan sama dengan guru yang sudah menjadi PNS, termasuk dalam peningkatan kesejahteraannya. Kebijakan sekolah dan implementasinya tidak membeda-bedakan, bahkan didorong untuk terus memiliki kinerja yang lebih baik.

Prinsip keadilan dalam peningkatan kinerja sekolah dilakukan dengan menerapkan perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada sekolah, pemberian kesempatan yang sama (tanpa membedakan) dalam penerimaan guru dan karyawan untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional, kesempatan yang sama dalam penerimaan siswa baru, pemberian penghargaan dan sanksi kepada semua pihak tanpa adanya diskriminasi, pemberian pelayanan prima yang sama kepada seluruh warga sekolah tanpa membedakan, serta memberikan fasilitas pelayanan yang sama.

#### 6) Partisipasi

Partisipasi dalam urusan bidang pendidikan berhubungan erat dengan keterlibatan stakeholders pendidikan yaitu pihak sekolah (peserta didik, pendidik, kepala sekolah), masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Stakeholders pendidikan tersebut merupakan partisipan utama *good school governance* yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Peningkatan kinerja sekolah melalui prinsip partisipasi yaitu dengan melibatkan seluruh komponen sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan kesiswaan (ekstrakurikuler, lomba, pertukaran pelajar, dan lain sebagainya), partisipasi dalam memberikan saran, pendapat, dan keinginan, keikutsertaan dalam program internal sekolah, partisipasi dalam penyusunan rencana strategi sekolah, partisipasi dalam perwakilan lembaga pendidikan, serta partisipasi dalam perencanaan program kerja sangat dibutuhkan dalam membentuk sekolah yang bermutu.

#### 7) Efektif dan Efisien

Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan kinerja sekolah diimplementasikan dalam bentuk kepemilikan SDM yang kompeten, pemberian kemudahan dalam pengelolaan lembaga pendidikan dari pemerintah, proses

penyelenggaraan pendidikan di sekolah tepat sasaran dan sesuai target yang ingin dicapai, pemberian kemudahan dalam penyusunan jadwal kerja/belajar, kemudahan dalam akses pemberian pelayanan pendidikan, kemudahan dalam birokrasi sekolah, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sekolah, pemberian layanan prima baik untuk pihak internal maupun eksternal sekolah, pemberian layanan tepat sasaran sesuai kebutuhan, serta terdapat peningkatan proses pelayanan dalam kurun waktu tertentu.

Efektivitas dan efisiensi dilihat dari angka kenaikan kelas menunjukkan kondisi yang baik yaitu semakin berkurang angka yang tidak naik kelas dari tahun ke tahun. Dilihat dari tingkat kelulusan siswa, yaitu jumlah siswa yang lulus pada ujian pertama semakin bertambah banyak, begitu pula dengan peserta yang lulus pada ujian ke dua serta semakin kecil jumlah siswa yang tidak lulus, baik pada ujian pertama maupun ujian ke dua. Jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi menunjukkan semakin meningkat. Semakin kecil jumlah siswa yang mengalami DO juga merupakan indikator efektif dan efisiennya suatu sekolah. siswa banyak mendapatkan juara I pada berbagai kompetisi, baik pada level kabupaten, provinsi, maupun nasional sebagai prestasi non akademik. Setiap personil mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya. Guru ada yang mengajar dua mata pelajaran, tetapi guru tersebut memang memiliki latar belakang pendidikan dengan mengikuti perkuliahan pada dua disiplin ilmu yang berbeda. Dalam hal kinerja guru, kepada sekolah secara langsung mengamati dan membina penampilan guru di kelas dan dilakukan untuk semua guru.

#### 8) Berorientasi pada Konsensus

Pembuatan kesepakatan-kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari perilaku penerapan prinsip *good school governance*. Media untuk membuat berbagai kesepakatan, sebagai contoh dapat berupa pertemuan rutin hari senin setelah Upacara Bendera. Selain itu, berbagai kesepakatan pihak sekolah juga dilakukan dengan pihak stakeholder sekolah, baik secara langsung maupun melalui fasilitas komite sekolah.

Kesepakatan juga penting antara guru dengan siswa. Kesepakatan ini dapat dilakukan di kelas dan di kegiatan upacara bendera. Di luar itu, kesepakatan juga dapat dibuat berdasarkan pertemuan langsung guru dengan siswa.

### 3. Keterkaitan Antara Variabel Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tata Kelola Pendidikan

Implementasi kurikulum merdeka adalah proses kegiatan untuk mengukur sejauh mana penerapan konsep “merdeka” pada kurikulum merdeka dapat memudahkan penyelenggara pendidikan untuk menyusun dan melaksanakan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sedangkan tata kelola pendidikan adalah proses bagaimana memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan bantuan kegiatan implementasi kurikulum merdeka sebagai salah satu elemen pengembangan pendidikan, sekolah dapat memaksimalkan seluruh sumber daya untuk memastikan pengembangan tersebut berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah sesuai atau tidak dengan harapan dan tujuan pendidikan.

Hal tersebut selaras dengan teori yang dinyatakan oleh Davis Campbell, Michael Fullan, dan Babs Kavanaugh dalam bukunya yang diadaptasi dari pernyataan Michael Fullan dalam makalahnya yang berjudul “*Choosing The Wrong Drivers Whole System Reform*” (Fullan, 2011) tentang *Governance Drivers*, dinyatakan bahwa penggerak adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk membuat perbedaan positif dalam praktik. Penggerak yang salah adalah kebijakan yang ternyata tidak membuat perbedaan, dan dalam beberapa kasus sebenarnya menjadi bumerang (Campbell et al., 2024)

Secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 1. 4 Kerangka Pemikiran**

#### **F. Hipotesis Penelitian**

Adapun hipotesis yang peneliti ajukan yaitu sebagai berikut:

Ha: Terdapat pengaruh implementasi kurikulum merdeka terhadap tata kelola lembaga pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung.

Ho: Tidak ada pengaruh implementasi kurikulum merdeka terhadap tata kelola lembaga pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Artikel Jurnal (Sumarsih et al., 2022a), yang berjudul “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar”. Yang mana

penelitian ini dilaksanakan di SDN Guruminda 244 Kota Bandung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah ditemukan adanya kurikulum merdeka yang menjadi acuan di sekolah penggerak, yang menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, rasa kebhinekaan. Kepala sekolah penggerak mendorong berbagai macam program partisipatif, unik, dan banyak inovasi. Memupuk kerja sama dengan guru-guru yang mendukung pemimpinnya berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah penggerak. Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang implementasi kurikulum merdeka. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan diteliti memiliki dua variabel yaitu implementasi kurikulum merdeka dan tata kelola lembaga pendidikan.

2. Artikel Jurnal (Nurwiatin, 2022), yang berjudul “Pengaruh Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kesiapan Kepala Sekolah Terhadap Penyesuaian Pembelajaran di Sekolah”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan memiliki pengaruh terhadap penyesuaian pembelajaran di sekolah. Pengaruhnya terbagi menjadi dua sisi, positif dan negatif. Positifnya, siswa dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju tentunya dengan dukungan kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, serta lembaga itu sendiri. Sisi negatifnya, mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa dan tujuan pendidikan. Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu, keduanya menggunakan dua variabel yaitu variabel X dan Y. Variabel X yang digunakan keduanya yaitu terkait kurikulum merdeka. Sedangkan yang membedakannya adalah variabel Y yang digunakan, yang terdapat pada penelitian ini yaitu terkait penyesuaian pembelajaran di sekolah, sedangkan yang akan diteliti yaitu terkait tata kelola lembaga pendidikan.

3. Artikel Jurnal (Simajuntak et al., 2022), yang berjudul “Administrasi Tata Kelola dalam Implementasi Kurikulum Merdeka”. Hasil studi menyatakan bahwa dalam implementasi kurikulum merdeka kepala sekolah mendorong tim untuk meningkatkan kompetensi *Creativity, collaborative communication, critical thinking* (4C) dan ditambah dengan *compation logic* (kebatinan) kepada murid dan guru-guru. Kepala sekolah perlu melakukan kepemimpinan: antara lain perubahan paradigm dari penguasa, pengendali (regulator) menjadi pelayan bagi guru dan siswa. Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang tata kelola dan implementasi kurikulum merdeka. sedangkan perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, sedangkan yang akan diteliti menggunakan metode kuantitatif.
4. Artikel Jurnal (Sudarmiani et al., 2022), yang berjudul “Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Guru SMP di Kota Madiun”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tahapan implementasi kurikulum merdeka, yaitu 1) Pembukaan, 2) Penyampaian materi Kurikulum Merdeka. 3) Penyusunan modul ajar. 4) Praktik pembuatan modul ajar. 5) Evaluasi tingkat pemahaman guru. Metode evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengisi angket sejumlah 10 pertanyaan. Angket dianalisis secara deskriptif. Indikator ketercapaian program adalah adanya peningkatan pemahaman guru dengan kriteria baik dan sangat baik sejumlah >70%. Selain itu juga adanya modul ajar dalam Kurikulum Merdeka yang siap diterapkan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang impleperentasi kurikulum merdeka. sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan diteliti memiliki dua variabel yaitu implementasi kurikulum merdeka dan tata kelola lembaga pendidikan.
5. Artikel Jurnal (Maryatini, 2023), yang berjudul “Pengembangan Kurikulum dan Keterlibatan Stakeholder Terhadap Kualitas Manajemen Kurikulum dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Sekolah”. hasil dari penelitian ini adalah

terdapat pengaruh signifikan Pengembangan Kurikulum terhadap Efektivitas sekolah. Dari hasil koefisien jalur yang diperoleh antara Pengembangan Kurikulum terhadap Efektivitas sekolah sebesar  $T_{statistik} = 2,949$  dengan nilai  $P\text{-Value } 0.003 < 0,05$  disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengembangan Kurikulum terhadap Efektivitas sekolah. Semakin tinggi Pengembangan Kurikulum maka akan semakin positif efektivitas sekolah. Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang pengembangan kurikulum namun penelitian ini lebih berfokus pada kurikulum terbaru yaitu Kurikulum Merdeka. Adapun perbedaannya terdapat pada variabel Y. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada efektivitas sekolah sedangkan penelitian ini berfokus pada tata kelola lembaga pendidikan.

6. Skripsi (Lipu, 2018), yang berjudul “Pengaruh Implementasi Manajemen Kurikulum dalam Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di Madrasah Aliyah As’adiyah Atapange Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”. Temuan penelitian menghasilkan bahwa Implementasi Manajemen kurikulum dilihat dari hasil penilaian 32 responden berada dalam kategori sedang yakni 71, 875%. 2) Hasil Belajar Peserta Didik dilihat dari 30 peserta dari nilai rata-rata rapor juga berada pada kategori sedang yakni sebesar 76%, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel implementasi manajemen kurikulum terhadap hasil belajar peserta didik yang hanya memperoleh 0,95. Jadi kontribusi implementasi manajemen kurikulum terhadap hasil belajar di MA As’adiyah tidak memiliki pengaruh yang signifikan melalui perhitungan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,9 < 2,05$  sehingga variabel X (manajemen kurikulum) terhadap Y (hasil belajar) tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang implementasi kurikulum. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan

diteliti memiliki dua variabel implementasi kurikulum merdeka dan tata kelola lembaga pendidikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah ditemukan dalam temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini mempunyai beberapa diferensiasi. Penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu lebih fokus pada bagaimana proses implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Dasar Islam Terpadu se-Kota Bandung mulai dari analisis konteks karakteristik sekolah, merumuskan visi, misi, dan tujuan, menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, dan merancang evaluasi, pengembangan profesional, dan pendampingan (Kemendikbud, 2022) yang pada akhirnya kita akan mengetahui pengaruhnya pada tata kelola pendidikan di Sekolah Islam Terpadu se-Kota Bandung diukur dengan menggunakan prinsip GSG (*Good School Governance*) yang dikemukakan oleh OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) 2013 (Kemendikbud, 2019) yang di dalamnya terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, keadilan, partisipasi, efektif dan efisien, serta berorientasi pada konsensus. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari studi yang telah dilaksanakan oleh para peneliti sebelumnya.